

Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Kerja Guru di Sekolah: Studi Kasus di SMPN 1 Sumbawa Barat

Gender Inequality in the Division of Teacher Labor in Schools: Case Study at SMPN 1 West Sumbawa

Adib Al-Mufakhir

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Email: almufakhiradib39@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24-07-2025
Accepted 17-08-2025
Published 18-08-2025

Keywords:

Gender Inequality
Division of Work
Teacher
SMPN 1 West Sumbawa

ABSTRACT

This research aims to understand the reality of gender inequality in the division of teacher work at SMPN 1 West Sumbawa, with a focus on the factors that influence gender inequality and the implications of gender construction in teachers' work at school. This research uses qualitative research methods by collecting data from various sources, such as books, journals and articles, to analyze gender gaps in school work. The research also uses an interview approach, namely collecting data from sources as the main source and various other sources such as books, journals and articles, as well as carrying out a data collection process to obtain valid data regarding gender gaps in school work. This study highlights the importance of gender equality in the division of work for teachers in schools by involving the community, educational institutions and high school officials to evaluate and contextualize the situation regarding gender inequality in the division of work for teachers in schools. There are two types of gender inequality identified: first, female teachers who are often placed in desk jobs or jobs that are classified as soft, second, female teachers who are often positioned in less strategic jobs with a smaller role and influence on schools so that policy is not a priority and only serves as an additional option or as a complement. These two problems are a fact that in the concept of division of labor, female teachers often experience injustice.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



How to cite article:

Adib Al-Mufakhir. (2025). Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Kerja Guru di Sekolah: Studi Kasus di SMPN 1 Sumbawa Barat. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.350>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas ketidaksetaraan gender dalam pembagian kerja guru di SMPN 1 Sumbawa Barat, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dan implikasi konstruksi gender dalam pekerjaan guru di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku dan artikel jurnal untuk menganalisis kesenjangan gender dalam pekerjaan sekolah. Penelitian juga menggunakan pendekatan wawancara, yaitu pengumpulan data dari narasumber sebagai sumber utama dan berbagai sumber lain seperti buku, jurnal, dan artikel, serta melakukan proses pengumpulan data untuk memperoleh data valid mengenai kesenjangan gender dalam pekerjaan sekolah. Studi ini menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan pejabat tinggi sekolah untuk mengevaluasi dan mengkontekstualisasikan situasi mengenai ketidaksetaraan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah. Ada dua jenis ketidaksetaraan gender yang teridentifikasi: pertama, guru perempuan yang sering ditempatkan pada

pekerjaan di balik meja atau pekerjaan yang tergolong lembut, kedua, guru perempuan yang sering di posisikan pada pekerjaan yang kurang strategis dengan peran dan pengaruh terhadap sekolah yang lebih kecil sehingga kebijakannya tidak menjadi prioritas dan hanya berkesan sebagai opsi tambahan atau sebagai pelengkap saja. Dua persoalan ini merupakan sebuah fakta bahwa dalam konsep pembagian kerjanya guru perempuan sering mendapat ketidakadilan.

Kata kunci: Ketimpangan Gender, Pembagian Kerja, Guru, SMPN 1 Sumbawa Barat

PENDAHULUAN

Secara umum pembagian tugas guru didalam lingkungan sekolah memiliki porsi yang berimbang dengan profesionalitas yang sama. Namun dalam realitanya terdapat pembagian tugas yang tidak seimbang antara guru laki-laki dan perempuan. Profesionalitas merupakan unsur paling penting yaitu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya dan memiliki tujuan utama untuk mencapai kesempurnaan hasil (Suwinandi, 2017). Terkhusus pembagian kerja guru di lingkungan sekolah, profesionalitas harus menjadi syarat utama dan mutlak dalam mengembannya. Seorang guru wajib memiliki kecakapan khusus didalam bidangnya dan penguasaan permasalahan lapangan demi berjalannya suatu proses pendidikan (Praharani N.S., 2016). Contoh profesionalisme guru adalah disiplin untuk mendampingi peserta didik, memegang teguh prinsip keadilan hingga aktif mengawasi peserta didik dalam berbagai kegiatan. Dari penjelasan diatas, seringkali guru laki-laki lebih layak ditugaskan di sektor lapangan dan terjun langsung untuk melihat kondisi siswa karena lebih terkesan maskulin daripada guru perempuan yang pada umumnya hanya ditempatkan di balik meja.

Pembagian kerja merupakan salah satu unsur penting dalam suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya proses dan tahap pembagian kerja. Dalam kasus pembagian kerja, mayoritas masyarakat masih cenderung mengkategorikan jenis kelamin dalam menentukan posisi yang dianggap layak untuk laki-laki dan perempuan (Khoiroh M., 2011: 10-11). Ketika masuk dunia kerja, perempuan sering di tempatkan dalam pekerjaan yang tidak terlalu penting dan dengan upah yang lebih rendah dari laki-laki. Disisi lain pula, perempuan sering dibebankan dengan tugas rumah tangga yang pada hakikatnya merupakan tugas bersama antara laki-laki dan perempuan yang berumah tangga. Sebagai contoh lain dalam kasus pembagian kerja dapat dilihat pada masyarakat petani, pembagian kerja pada profesi petani masih cenderung menggunakan peranan gender. Pembagian kerjanya masih disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas yang berbasis gender atau jenis kelamin. Hal tersebut disebabkan oleh konstruksi sosial yang di kategorikan berdasarkan faktor sifat atau karakter antara laki-laki maupun perempuan (Amir S., dkk, 2013: 4). Pengkategorian seperti ini secara otomatis akan merambat pula terhadap kasus lain seperti, posisi kepemimpinan dalam pekerjaan. Posisi kepemimpinan utama atau posisi strategis pada umumnya lebih di ekspektasikan kepada sosok pemimpin laki-laki yang maskulin, memiliki pemikiran analitis dan rasional, sehingga lebih dianggap cocok dan pantas. Ekspektasi tersebut menciptakan pembatas terhadap perempuan sehingga untuk mencapai posisi pekerjaan yang tinggi dan strategis sangat sulit dan bahkan tidak memungkinkan. (Innayah M.N. dkk, 2019: 3).

Ketimpangan gender merupakan suatu kondisi dimana adanya suatu perlakuan atau tindakan yang tidak adil terhadap jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender sendiri lebih sering terjadi pada jenis kelamin perempuan. Secara umum, awal mula terjadinya ketimpangan gender terhadap perempuan adalah *pertama*, paradigma turun temurun yang menilai perempuan sebagai makhluk yang lemah, lembut dan sangat emosional sehingga perlu dinaungi dan dilindungi (Sasmita J. dkk, 2017). *Kedua*, pembatasan terhadap kemampuan dan kapasitas perempuan dalam mengembangkan diri yang disebabkan oleh stereotip gender. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya pendidikan yang alami oleh perempuan. Fenomena tersebut menjadi penyebab lanjutan dari pembeda derajat antara laki-laki dan perempuan (Hadiarta A.P., 2021: 20). Kedua faktor tersebut akan selalu menjadi permasalahan utama dalam ketimpangan gender apabila tidak ditindaklanjuti secara kritis.

Secara konsep, gender memiliki bebarap konsep pertama, *gender sebagai konstruksi dan identitas*, Oakley mengemukakan bahwa yang menjadi penyebab utama pembeda antara laki dan perempuan di masyarakat adalah konstruksi sosial dan bukan biologis. Pembeda tersebut dibangun secara kultural baik berupa perbedaan status, sifat peran hingga tanggungjawab yang mana kesemuanya bukan yang bersifat kodrati (Kartini A. dkk, 2019: 6). Dalam konsep lain, gender merupakan identitas yang diperoleh oleh seseorang dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan dianggap sebagai sosok yang cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki di pandang sebagai sosok yang rasional, gentle dan kuat. Pelabelan ini bersifat

dinamis hingga dapat dipertukarkan karena gender memiliki karakteristik yang bersifat tidak permanen sesuai dengan kondisi dan waktu, lentur dan cair, dan bersifat lokalitas atau sesuai dengan tradisi masyarakat tertentu (Rohmaniyah I., 2020: 6).

Secara khusus, beberapa artikel menyatakan ketimpangan gender yang dialami oleh mayoritas perempuan dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor yaitu *pertama*, istilah *stereotip* atau pelabelan secara umum terhadap perempuan menjadi salah satu faktor utamanya dimana perempuan biasanya mendapatkan pelabelan umum yang bersifat negatif seperti lemah, penakut dan cengeng sebagai pembeda dengan sifat laki-laki yang lebih bersifat positif. *Kedua*, faktor *subordinasi* atau penomorduuan perempuan yang masif hampir disegala bidang sehingga mendapat posisi yang lebih rendah. *Ketiga*, adanya upaya *marginalisasi* yaitu meminggirkan kaum perempuan yang secara umum terjadi di bidang ekonomi dimana perempuan di anggap bukan sebagai tulang punggung sehingga tidak dituntut untuk bekerja. *Keempat*, kondisi *double burden* yang di alami oleh mayoritas wanita karir dimana perempuan dibebankan kepada peran ganda yaitu pekerjaan rumah dan karirnya. *Kelima*, kekerasan *violence* merupakan perlakuan kekerasan fisik dan psikis yang di sebabkan oleh keempat faktor sebelumnya. Hal-hal diatas merupakan ketidakadilan atau ketimpangan gender yang secara umum di alami oleh perempuan (Natasha H., 2013: 4).

Penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan gender dalam profesi keguruan, sejauh ini hanya berfokus terhadap beberapa aspek. *Pertama*, pembahasan tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pembelajaran gender (Yanur, 2008. Evi, 2020. Siany, 2010). Evi mengatakan bahwa dalam pendidikan guru paud dasawarsa ini telah mendapatkan stereotipi yaitu profesi guru paud yang terkesan feminim sehingga banyak laki-laki yang kurang tertarik dengan profesi guru paud, padahal peran laki-laki dalam pendidikan anak tidak kalah penting dengan perempuan. *Kedua*, ketimpangan gender dalam mata pelajaran (Lisa, 2023. Lintang, 2015. Chairani, 2016). Lisa mengatakan bahwa pembelajaran bahasa indonesia yang berbasis gender dapat dijadikan sarana untuk menanamkan nilai kesetaraan gender. *Ketiga*, tentang diskusi stereotipi gender dalam budaya patriarki (Nanang, 2015. Rahmi dkk, 2012. Muya Syaroh, 2023). dikatakan bahwa tidak mudah mewujudkan konsep kesetaraan gender di indonesia yang salah satunya di sebabkan oleh konstruksi budaya masyarakat melalui budaya patriarki yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan.

Tujuan dari kajian ini yakni hadir untuk melengkapi kekurangan dari kajian-kajian terdahulu yang belum menyentuh ketimpangan gender yang terjadi dalam pembagian kerja guru di sekolah. Sejalan dengan itu ada tiga pertanyaan yang akan di jawab dalam tulisan ini, yaitu Pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah. Kedua, mengkritisi faktor-faktor yang mendorong munculnya ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah. Ketiga, bagaimana implikasi dari konstruksi gender dalam pembagian kerja guru di SMPN 1 Sumbawa Barat.

Kajian ini penting untuk dilakukan, karena kajian ini berupaya untuk memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah, mengkritisi faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah dan implikasi dari konstruksi gender dalam pembagian kerja guru di SMPN 1 Sumbawa Barat. Ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru yang dialami oleh guru perempuan ini perlu dipahami bersama oleh lembaga pendidikan secara umum dan terkhusus para pimpinan utama dan komite sekolah sebagai penggerak dan penentu jalannya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, agar tercipta kesetaraan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah.

METODE

Tulisan ini berangkat untuk mengungkap realitas terhadap ketimpangan gender yakni dalam hal pembagian kerja guru di sekolah dengan mendalami bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru, faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru dan dan implikasi dari konstruksi gender dalam pembagian kerja guru di SMPN 1 Sumbawa Barat. Pentingnya pemilihan penelitian ini, agar ketimpangan gender yang tampak dalam pembagian kerja guru di sekolah, mampu untuk dianalisis oleh peneliti dengan bantuan analisis teori ketimpangan gender sebagai upaya untuk mengetahui akar masalah ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif* yang mengutamakan data lapangan sebagai data primer peneliti. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada realitas yang terjadi di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai upaya mendeskripsikan informasi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Meleong L.J., 2001: 3). Pendekatan kualitatif dalam mengelola data

menggunakan analisis kritis sehingga menghasilkan poin penting terkait dengan permasalahan ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah.

Penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa pengumpulan data-data kepustakaan yakni proses pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal dan artikel. Penekanan pada penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, pendapat, gagasan, dan lain-lain yang mampu untuk dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Selain menggunakan data-data penelitian terdahulu dari berbagai jurnal-jurnal maupun artikel, penelitian disini juga melakukan sebuah proses pengamatan mendalam untuk mendapatkan data-data primer dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang valid terkait tentang ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menjelaskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Karena penelitian dalam bentuk kajian lapangan, maka teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah menganalisis data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikan dan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian ada proses penyajian data dan kesimpulan. Proses reduksi data, penyajian data dan kesimpulan secara bertahap dengan proses memilah dan memilih data (Emizer, 2012: 85). Setelah itu mengambil data yang relevan dengan hasil dari proses memilah dan memilih yang dibahas dalam tiga pemetaan pembahasan kemudian diambil poin-poin penting pada masing-masing tema maupun keseluruhan tema. Dalam menemukan data konkrit di lapangan, penulis melakukan interview atau wawancara bersama narasumber secara *virtual* atau komunikasi jarak jauh dengan menyiapkan instrumen data yang nantinya akan dijawab oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Kerja Guru di Sekolah

Tugas lapangan yang pada umumnya lebih mengandalkan fisik atau pekerjaan yang sifatnya memiliki banyak ruang gerak untuk melakukan suatu tindakan. Adapun tugas guru dalam kategori lapangan adalah seperti sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, pramuka dan drum band yang secara umum lebih mengandalkan kerja fisik. Pada saat yang sama, perempuan hanya ditempatkan pada jenis pekerjaan yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan dan di balik meja yang cenderung memiliki ruang gerak yang lebih sempit atau lebih sederhananya, tugas guru perempuan lebih tergolong kepada pekerjaan yang bersifat lembut seperti mengajar di kelas, menjadi wali kelas, menjadi penanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat dan bagian bendahara. Hal ini menjadi permasalahan serius terhadap posisi guru perempuan yang tanpa sadar telah dibatasi ruang geraknya dengan adanya pelanggaran terhadap posisi pekerjaannya. Fenomena ini akan membuat guru perempuan merasakan ketidakadilan apabila pelanggaran dalam pembagian kerjanya yang cenderung timpang. Penerapan pembagian kerja yang cenderung timpang seperti ini, akan membatasi hak guru perempuan dalam karirnya seperti bebas dalam menentukan bagian pekerjaannya yang sesuai dengan tingkat profesionalitas dan tingkat kompetensinya.

Pada kasus lain, seringkali guru laki-laki ditempatkan pada pekerjaan strategis dan bergengsi yang sifatnya memiliki peran dan pengaruh penting terhadap sekolah seperti komite sekolah, kepala sekolah dan kepala-kepala bagian, sehingga kebijakannya dapat diprioritaskan. Sementara sebagian besar guru perempuan hanya ditempatkan pada posisi pekerjaan yang kurang strategis dengan peran dan pengaruh yang lebih kecil terhadap sekolah seperti menjadi anggota bagian dalam struktur organisasi sekolah sehingga kebijakannya tidak menjadi prioritas dan bahkan hanya bersifat opsi kedua atau usulan yang tidak terlalu diperjuangkan sehingga guru perempuan lebih berkesan sebagai penerima keputusan dan bukan sebagai penentu keputusan akhir. Dengan konsep pembagian seperti ini, dapat menurunkan pengaruh dan peran guru perempuan terhadap sekolah terkhusus dalam hal mengambil kebijakan penting, mengingat antara guru laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam menentukan kebijakan sekolah (Yulianti S., *Wawancara Virtual* 2023).

Faktor-Faktor Yang Mendorong Munculnya Ketimpangan Gender Dalam Pembagian Kerja Guru di Sekolah

Fenomena ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong ketimpangan itu terjadi. Faktor-faktor yang mendorong munculnya ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah seperti guru laki-laki yang seringkali di

tempatkan pada sektor lapangan, karena pandangan sosial yang menganggap bahwa guru laki-laki memiliki tenaga fisik yang kuat dan penampilan yang maskulin sehingga tugas-tugas lapangan dapat dengan mudah teratasi, dan juga guru laki-laki cenderung di takuti oleh peserta didik sehingga memudahkan dalam mengatur dan memobilisasi segala kegiatan yang ada di luar kelas. Di sisi lain, guru perempuan yang hanya di tempatkan pada pekerjaan di balik meja yang tergolong dalam pekerjaan yang lembut, karena anggapan bahwa guru perempuan memiliki ketelitian yang lebih baik sehingga dirasa layak untuk ditempatkan dalam pekerjaan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan pada kasus kedua adalah sering kali guru laki-laki ditempatkan pada posisi atau bagian pekerjaan yang strategis dan tergolong bergengsi. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa guru laki-laki lebih mengedepankan logika sehingga dianggap bijak dalam mengambil keputusan. Sementara guru perempuan yang ditempatkan dalam pekerjaan yang kurang strategis, karena adanya pelanggengan bahwa guru perempuan lebih cenderung mengedepankan perasaan dan rentan bersikap labil sehingga dianggap kurang layak untuk mendapatkan bagian pekerjaan yang memiliki otoritas tinggi dalam menentukan suatu kebijakan.

Implikasi Dari Konstruksi Gender Dalam Pembagian Kerja Guru di SMPN 1 Sumbawa Barat

SMPN 1 Sumbawa Barat merupakan salah satu sekolah yang sangat menjunjung tinggi profesionalitas kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat keputusan resmi kepala sekolah tentang profesionalitas kerja guru (SK KaSMPN 1 Taliwang, Sumbawa Barat, No: 422.3/320/SMPN 1 Tlg/2023). Akan tetapi dalam pembagian kerjanya, masih menunjukkan adanya unsur konstruksi gender sehingga masih menduga adanya unsur ketimpangan dalam pembagiannya. SMPN 1 Sumbawa Barat sendiri memiliki konsep pembagian kerja terhadap guru-gurunya adalah sebagai berikut, untuk tugas guru perempuan, sekolah lebih memprioritaskan mereka kepada tugas seperti, *pertama*, penanggungjawab akademik dan kurikulum yang tugasnya mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan akademik seperti membuat SK pembagian tugas, mengatur jadwal kegiatan belajar mengajar, mengatur jadwal supervisi administrasi guru dan supervise kelas, sampai dengan tahap evaluasi dan penilaian akademik siswa, *kedua*, menjadi wali kelas, karena lebih mudah membimbing siswa di kelasnya melalui pendekatan secara emosional dengan naluri keibuannya. *Ketiga*, menjadi pembina olimpiade sains karena perempuan lebih teliti dan lebih terampil dalam membina.

Adapun sekolah lebih memprioritaskan guru laki-laki terhadap tugas seperti, *pertama*, menjadi penanggungjawab kesiswaan yang mengatur dan memantau siswa dari pagi sampai jadwal siswa pulang, *kedua*, menjadi penanggungjawab urusan sarana dan prasarana yang mengatur semua fasilitas di sekolah, *ketiga* menjadi pembina olahraga, pramuka, drumband yang lebih mengandalkan fisik. Dari konsep pembagian kerja guru SMPN 1 Sumbawa Barat yang telah dijelaskan di atas, masih dapat ditemukan implikasi atau dugaan adanya penerapan konsep pembagian kerja berbasis gender yang masih menempatkan guru perempuan pada pekerjaan yang tergolong halus dan dibalik meja, berbeda dengan guru laki-laki yang ditempatkan pada sektor lapangan dan menjadi pengekskusi lapangan (Yulianti S., *Wawancara Virtual* 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, prmbagian kerja guru berbasis gender yang terjadi di SMPN 1 Sumbawa Barat, memunculkan ketimpangan gender yang dialami oleh guru perempuan mulai dari termarginalnya posisi guru perempuan dalam memperoleh pekerjaan hingga tersubordinasinya guru perempuan dalam hal kebijakan, hingga adanya proses pelanggengan dalam konsep pembagian kerja dengan menggunakan basis gender. Fenomena adanya ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah ini menjadi penting untuk dipahami bersama oleh masyarakat luas, pihak lembaga pendidikan dan pejabat utama sekolah untuk melakukan evaluasi dan kontekstualisasi zaman terhadap persoalan tentang ketimpangan gender dalam pembagian kerja guru di sekolah yang mana guru laki-laki lebih layak ditempatkan di sektor lapangan sementara guru perempuan lebih layak di balik meja, dan kebijakan guru laki-laki lebih di utamakan daripada kebijakan guru perempuan.

Pada persoalan tentang ketimpangan gender dalam pembagian kerja di SMPN 1 Sumbawa Barat yang dialami oleh guru-guru perempuan terdapat dua bentuk ketimpangan yang terjadi yakni pertama, guru perempuan yang sering ditempatkan pada pekerjaan di balik meja atau pekerjaan yang tergolong lembut, kedua, guru perempuan yang sering di posisikan pada pekerjaan yang kurang strategis dengan peran dan pengaruh terhadap sekolah yang lebih kecil sehingga kebijakannya tidak menjadi prioritas dan hanya berkesan sebagai opsi tambahan atau sebagai pelengkap saja. Dua persoalan ini merupakan sebuah fakta bahwa dalam konsep pembagian kerjanya, guru perempuan

sering mendapat ketidakadilan. Dalam upaya menghilangkan bentuk ketimpangan dalam pembagian kerja guru di sekolah, perlu adanya kesadaran bagi seluruh guru di sekolah terkhusus terhadap pejabat utama sekolah sebagai pemegang kebijakan tertinggi tentang kesamaan hak antara guru laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S., & Suhartini, E. (2013). Mekanisme pembagian kerja berbasis gender. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jember (UNEJ)*.
- Astina, C. (2016). Ketimpangan gender dalam pendidikan. *Studi Agama dan Budaya: Manarul Qur'an*, 10(13).
- Cahyani, L. D., & Sugiarto, S. (2022). Potret pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kesetaraan gender pada siswa jenjang sekolah menengah pertama di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kependidikan*, 7(2).
- Christiani, L. C. (2015). Pembagian kerja secara seksual dan peran gender dalam buku pelajaran SD. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1).
- Dianita, E. R. (2020). Stereotip gender dalam profesi guru pendidikan anak usia dini. *Indonesian Journal of Early Childhood Education*, 1(2).
- Emizer. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadiarta, A. P., et al. (2021). Berbagai bentuk ketidakadilan gender. Dalam *Kajian pengarusutamaan gender, analisis ketimpangan gender spasial dan pengaruhnya terhadap perekonomian wilayah* (hlm. xx-xx). Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- Innayah, M. N., & Pratama, B. C. (2019). Tantangan dan kesempatan wanita dalam lingkungan kerja. *Jurnal Manajemen*, 13(2).
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefedensi gender dan seks. *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2).
- Khoiroh, M. (2011). Gerakan kesetaraan gender: Upaya mengurangi kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. *Jurnal Studi Gender Indonesia*, 2(2).
- Liestyasari, S. I. (2017). Sensitivitas gender guru sekolah dasar (Mewujudkan pendidikan adil gender dan profesionalitas guru di Kota Surakarta). *Jurnal Pamator*, 1(2).
- Lubis, M. S. I., Nurhayati, dkk. (2023). Sosialisasi kesadaran dan keadilan gender dalam mengantisipasi kekerasan gender bagi guru, murid SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(1).
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan: Faktor penyebab, dampak, dan solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(1).
- Praharani, N. S. (2016). Profesionalisme guru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. [Artikel ilmiah, tanpa keterangan jurnal].
- Rahmi, F., & Habibullah. (2012). Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan: Studi pada perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Sosiokonsepia*, 17(1).
- Rohmaniyah, I. (2020). Gender: Konstruksi sosial dan alat analisis. Dalam M. Yaser (Ed.), *Gender & konstruksi patriarki dalam tafsir agama* (hlm. xx-xx). Yogyakarta: Suka Press.
- Sasmita, J., & Raihan, S. A. (2017). Kepemimpinan pria dan wanita. *Repository Universitas Riau*.
- Setyaningrum, Y. (2012). Analisis isi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. [Artikel ilmiah, tanpa keterangan jurnal].
- SMP Negeri 1 Taliwang. (2023). *Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Taliwang Nomor: 422.3/320/SMPN 1Tlg/2023 tentang pembagian beban kerja pendidik semester ganjil SMP Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat Tahun Pelajaran 2023/2024*.
- Susanto, N. H. (2016). Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki. *Muwazah*, 7(2).
- Suwinardi. (2017). Profesionalisme dalam bekerja. *Orbith*, 13(2).
- Yulianti, S. (2025, Mei 13). Wawancara virtual dengan guru PAI SMPN 1 Taliwang, Sumbawa Barat. [Komunikasi pribadi].